

STABILISASI HARGA PANGAN OLEH BULOG *TAHUN 2019*

Disampaikan Oleh:
Direktur Pengadaan Perum BULOG

Jakarta, 14 Januari 2019

www.bulog.co.id



PENDAHULUAN

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.13 TAHUN 2016
Pemerintah memberikan penugasan kepada Perum BULOG sbb :

a. Melanjutkan penugasan pengelolaan beras berupa :

- 1) Pengamanan harga beras di produsen dan konsumen
- 2) Pengelolaan CBP
- 3) Penyediaan dan pendistribusian beras kepada golongan masy tertentu
- 4) Pelaksanaan impor beras

b. Selain melanjutkan penugasan, pemerintah memberikan penugasan untuk :

- 1) Pengembangan industri berbasis beras
- 2) Pengembangan pergudangan beras

c. Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus :

- 1) Pengamanan harga pangan lain di produsen dan konsumen
- 2) Pengelolaan CPP
- 3) Penyediaan dan pendistribusian pangan
- 4) Pelaksanaan impor pangan
- 5) Pengembangan industri berbasis pangan
- 6) Pengembangan pergudangan pangan

d. Dalam melaksanakan penugasan :

Apabila menurut kajian finansial **tidak menguntungkan**, maka Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus memberikan **kompensasi** atas semua biaya yang telah dikeluarkan termasuk **margin** yang diharapkan sesuai dengan tingkat kewajaran penugasan yang diberikan

e. Penugasan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan penunjukan langsung

f. Perum BULOG dapat bekerjasama dengan pihak lain

g. Sumber pembiayaan

- 1) Dana internal perusahaan
- 2) APBN/APBD
- 3) pinjaman
- 4) Pendanaan lain sesuai ketentuan

PERAN BULOG DALAM PENGELOLAAN PANGAN

Dalam Membantu Mewujudkan Kedaulatan Pangan, BULOG Berperan Dalam Menegakkan
TIGA PILAR KETAHANAN PANGAN

3 PILAR

Pilar Ketersediaan



Melaksanakan kebijakan pembelian pangan dengan ketentuan HPP & Harga Acuan Pembelian

Pilar Keterjangkauan



Pemerataan stok nasional, Penyaluran Bansos Rastra dan pangan lain, OP dan penjualan melalui jaringan internal & eksternal

Pilar Stabilitas



Menjaga stabilitas harga di tingkat Petani dan Konsumen

LANGKAH-LANGKAH BULOG

[Dalam Menekan Kenaikan Harga Pangan Pokok Dan Meredam Inflasi]

PILAR 1

K
E
T
E
R
S
E
D
I
A
A
N



Melakukan Pemerataan Stok Pangan Pokok di seluruh wilayah Indonesia, diawali dengan penyerapan pangan pokok produksi petani lokal



Penyerapan Beras Dalam Negeri (DN) tahun 2018 yang mencapai 1,49 juta ton dan pengadaan Luar Negeri (LN) yang mencapai 1,77 juta ton.



Penyerapan Gula Petani sebanyak 446.706 ton dalam rangka penyediaan ketersediaan gula di pasaran umum oleh BULOG.



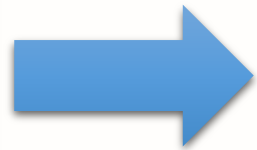
Pembelian Komoditas Pangan Pokok Lainnya, seperti daging kerbau, minyak goreng, bawang merah, tepung terigu, dll



LANGKAH-LANGKAH BULOG

[Dalam Menekan Kenaikan Harga Pangan Pokok Dan Meredam Inflasi]

K
E
T
E
R
J
A
N
G
K
A
U
A
N



PENERAPAN HARGA JUAL OPERASI PASAR CBP
[dibedakan menjadi 3 harga berdasarkan regionalisasi]



PERLUASAN JARINGAN



MENGELOLA VOLUME CBP
[sebesar 1 s/d 1,5 juta ton]



**MELAKSANAKAN PENYALURAN BANSOS RASTRA,
OPERASI PASAR, DAN PENANGGULANGAN BENCANA
ALAM**
[dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap
pangan pokok secara ekonomi dan geografis]



- RUMAH PANGAN KITA
- WARUNG KITA
- RUMAH PANGAN SANTRI
- TOKO RETAIL MODERN
- PASAR TRADISIONAL
- KEGIATAN BAZAR
- BUMDES

PENERAPAN HARGA OP CBP

HARGA JUAL BERAS OP-CBP PER WILAYAH

(BERDASARKAN PERMENDAG NO 57/M-DAG/PER/08/2017)

PENERAPAN HARGA JUAL OPERASI PASAR CBP

DIBEDAKAN MENJADI 3 HARGA
BERDASARKAN REGIONALISASI

No	Wilayah	Kemasan	Harga af Gudang/kg	HET Permendag 57
1	Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi	Curah (50kg)	8.100,-	9.450,-
2	Wilayah Sumatera kecuali Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan	Curah (50kg)	8.600,-	9.950,-
3	Wilayah Maluku dan Papua	Curah (50kg)	8.900,-	10.250,-

PENYEBARAN STOK BERAS

MENJAGA KETERJANGKAUAN PANGAN DI SELURUH WILAYAH INDONESIA YANG BERADA DI 1.507 UNIT GUDANG OPERASIONAL DI BAWAH DIVRE/SUBDIVRE.

(ton)

No	Divre	CBP	Komersial	Jumlah
1	Aceh	27.620	122	27.742
2	Sumut	80.219	494	80.713
3	Riau & Kepri	23.573	3.152	26.725
4	Sumbar	11.881	94	11.975
5	Jambi	5.034	768	5.801
6	Sumsel & Babel	31.831	1.785	33.616
7	Bengkulu	6.172	767	6.939
8	Lampung	66.592	1	66.593
9	DKI Jakarta & Banten	475.619	7.331	482.950
10	Jabar	189.028	33.417	222.445
11	Jateng	117.525	10.863	128.389
12	D.I.Yogyakarta	33.342	782	34.124
13	Jatim	603.087	59.657	662.744
14	Kalbar	12.887	793	13.680
15	Kaltim	15.525	1.191	16.717
16	Kalsel	19.334	316	19.650
17	Kalteng	9.224	689	9.913
18	Sulut & Gorontalo	27.084	93	27.177
19	Sulteng	9.872	-	9.872
20	Sultra	13.392	123	13.515
21	Sulsebar	76.993	29.146	106.139
22	B a l i	13.083	400	13.483
23	N.T.B.	44.736	4.323	49.059
24	N.T.T.	27.646	379	28.024
25	Maluku & Malut	13.858	2.645	16.503
26	Papua & Pabar	32.205	1.191	33.397
INDONESIA		1.987.365	160.521	2.147.886

LANGKAH-LANGKAH BULOG

[Dalam Menekan Kenaikan Harga Pangan Pokok Dan Meredam Inflasi]

PILAR 3

S
T
A
B
I
L
I
T
A
S



HULU



BULOG membeli gabah dan beras dengan harga sesuai Inpres no.5 tahun 2015 dengan tujuan menjaga harga jual petani di tingkat yang aman.

BULOG membeli gula petani BUMN dengan harga Rp.9.700/Kg dengan tujuan menghalau harga jatuh.



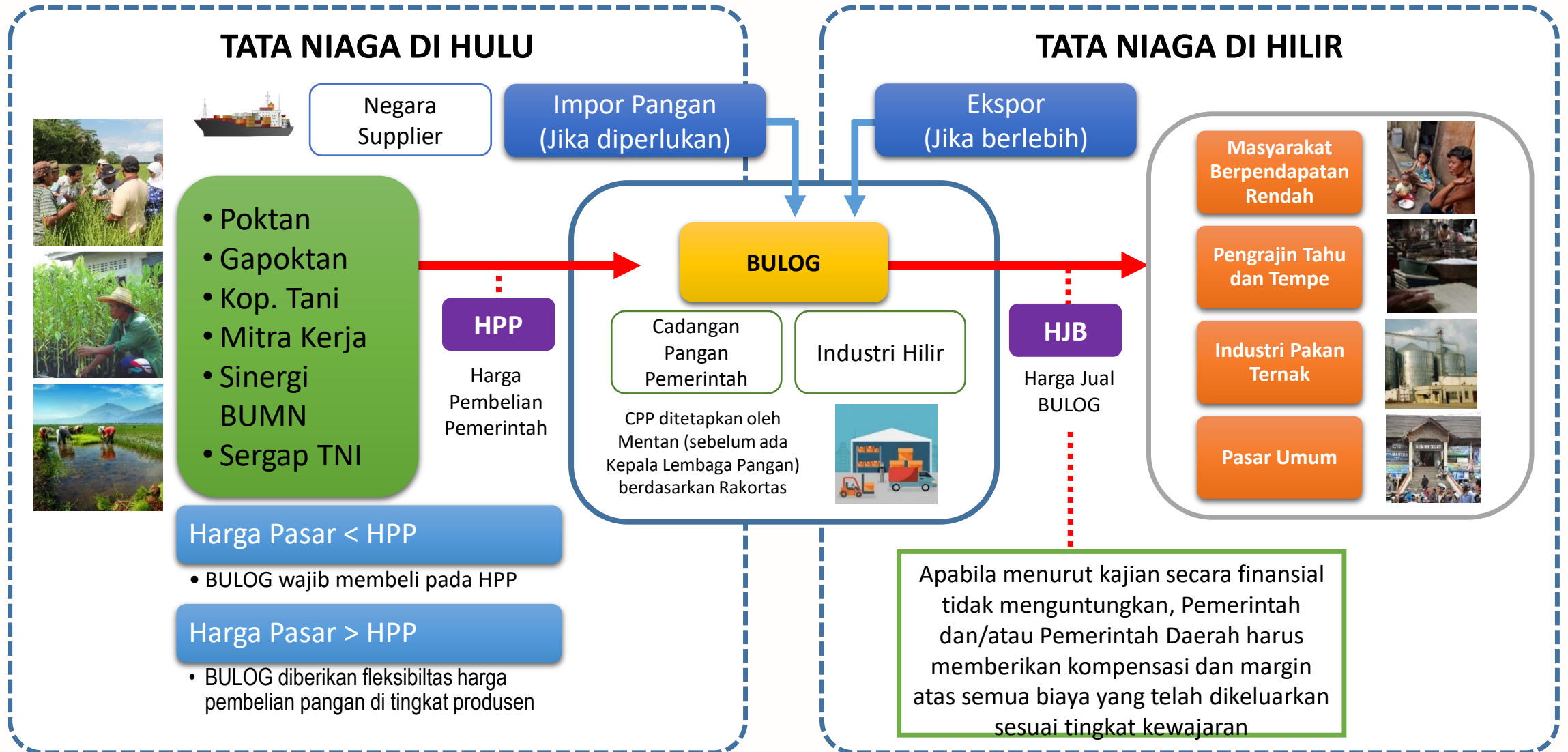
HILIR



Pelaksanaan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) di seluruh pasar pencatatan BPS dan pasar lainnya dalam rangka meredam fluktuasi harga beras dan pangan pokok lain serta inflasi.

BULOG menjual beberapa komoditas seperti beras, gula, dan daging sapi sesuai dengan HET yang ditetapkan Pemerintah.

PERAN BULOG DALAM MENJAGA STABILITAS HARGA PANGAN POKOK



STABILITAS HARGA DI TINGKAT HULU

Di Tingkat Hulu, Stabilisasi Harga Dilakukan Oleh BULOG Dengan Menyerap Produksi Petani Dalam Negeri Dengan Harga Sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Atau Harga Acuan Pembelian.

Realisasi Pengadaan Komoditas Tahun 2018



Beras
1.488.584 ton



Telur Ayam
988 ton



Tepung Terigu
1.300.000 kg



Minyak Goreng
9.000.000 liter



Gula Pasir
446.706 ton

STABILITAS HARGA DI TINGKAT HULU

Di Tingkat Hilir, Stabilisasi Harga Dilakukan Oleh BULOG Dengan Melakukan:

- ✓ Penyaluran untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui **Bansos Rastra**.
- ✓ Program **Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH)** di pasar-pasar umum dan pasar pencatatan BPS.
- ✓ Penyaluran beras CBP bagi daerah yang mengalami **bencana alam** yakni dengan kuantum maksimal sebesar 100 ton untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dan 200 ton untuk Pemerintah Provinsi.

Realisasi Penyaluran di Tahun 2018



Penyaluran Bansos Rastra
1.208.026 ton



Penyaluran CBP – KPSH
544.649 ton

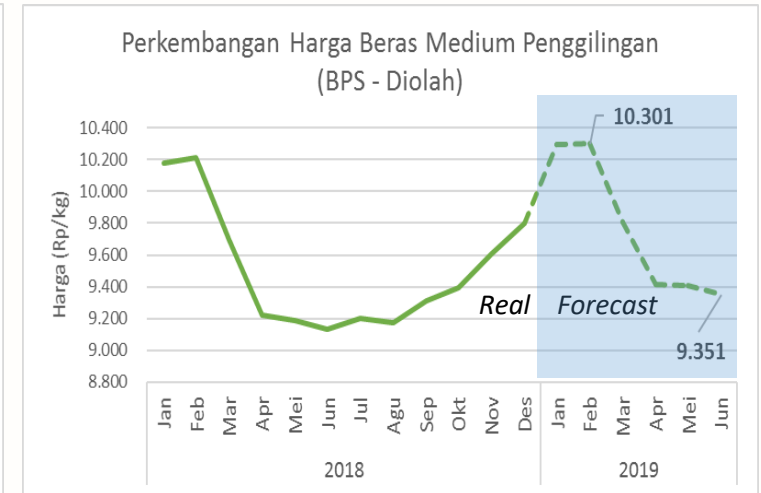
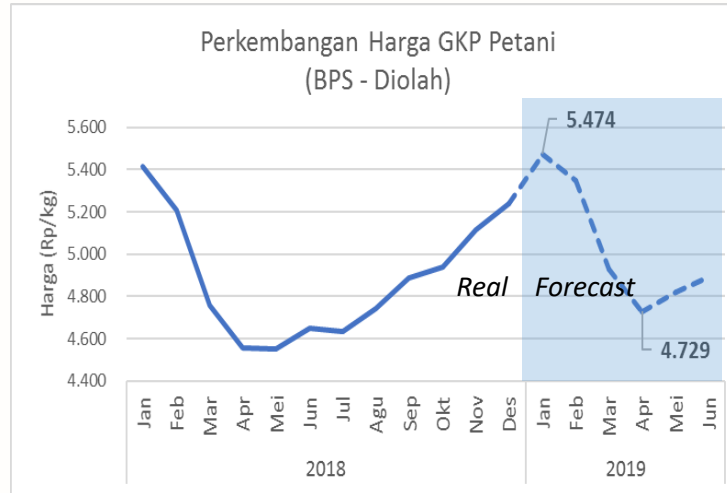


Penyaluran CBP – Bencana Alam
6.953 ton

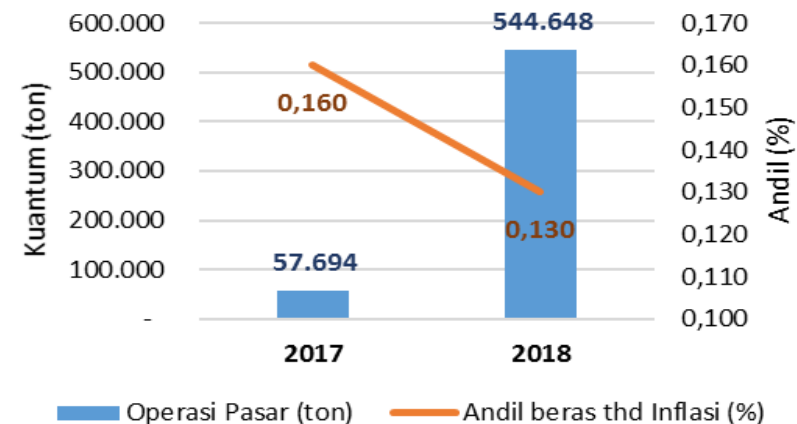
DAMPAK OPERASIONAL BULOG TERHADAP PERGERAKAN HARGA



1. Pergerakan harga gabah dan beras tingkat penggilingan relatif stabil, terdapat kenaikan harga disebabkan pada saat ini sedang musim tanam.
2. Prakiraan harga gabah/beras produsen tahun 2019 sesuai harapan petani, yakni di atas HPP (produsen).
3. Penyaluran KPSH yang tinggi di tahun 2018 dapat menekan andil beras terhadap inflasi.



Program Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga dan Dampaknya pada Andil Beras terhadap Inflasi





TARGET PENGADAAN GABAH/BERAS TAHUN 2019

Dalam rangka stabilisasi harga di tingkat produsen

DASAR KEBIJAKAN

Inpres No. 5 Tahun 2015

Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah

- Kebijakan pembelian gabah beras petani dalam negeri pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
- Kebijakan penyediaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta penyaluran beras kepada masyarakat berpendapatan rendah
- Importasi beras yang hanya dilakukan oleh Perum BULOG apabila ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan CBP, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri.

Jenis	Harga Inpres No. 5 / 2015	HPP dengan fleksibilitas 10%
GKP Petani	Rp.3.700/kg	Rp.4.070/kg
GKP Penggilingan	Rp.3.750/kg	Rp.4.125/kg
GKG Penggilingan (di Gudang BULOG)	Rp.4.650/kg	Rp.5.115/kg
Beras Penggilingan	Rp.7.300/kg	Rp.8.030/kg

TARGET PENGADAAN PERUM BULOG TAHUN 2019

satuan Ton setara beras

No	DIVRE	JAN	FEB	MAR	JUMLAH JAN-MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH JAN - DES
1	DKI & BANTEN	404	11.374	19.933	31.711	3.634	1.131	244	163	324	566	969	647	405	39.794
2	JABAR	1.959	57.208	102.471	161.638	17.977	5.749	1.564	808	1.704	2.908	4.805	3.321	1.954	202.429
3	JATENG	2.105	81.046	152.127	235.278	23.872	7.504	2.133	1.761	2.397	4.075	6.505	4.362	2.511	290.398
4	DI YOGYAKARTA	1.894	26.592	46.983	75.469	4.655	2.339	522	350	676	1.175	2.001	1.342	848	89.376
5	JATIM	3.770	98.307	177.774	279.851	30.962	9.978	2.514	1.527	3.250	5.333	8.621	5.741	3.438	351.215
6	ACEH	467	10.926	19.455	30.849	3.511	1.105	279	189	332	563	939	643	419	38.828
7	SUMUT	209	5.841	10.234	16.283	2.948	305	66	44	88	153	262	175	109	20.433
8	RIAU & KEPRI	112	1.117	2.211	3.440	369	126	64	45	51	72	101	82	67	4.416
9	SUMBAR	107	2.927	5.130	8.164	935	291	63	42	84	146	249	167	104	10.245
10	JAMBI	107	2.927	5.130	8.164	935	291	63	42	84	146	249	167	104	10.245
11	SUMSEL	875	20.388	35.251	56.514	6.409	1.955	432	268	546	988	1.677	1.112	669	70.570
12	BENGKULU	92	2.498	4.378	6.969	798	248	54	36	72	125	213	142	89	8.746
13	LAMPUNG	1.021	29.195	51.142	81.357	9.325	2.901	622	414	829	1.451	2.487	1.658	1.036	102.079
14	KALBAR	23	542	951	1.517	173	54	12	9	16	27	46	31	20	1.905
15	KALTIM	51	1.429	2.504	3.984	457	142	31	20	41	71	122	81	52	5.000
16	KALSEL	287	8.075	14.148	22.510	2.580	802	173	115	230	402	688	459	287	28.245
17	KALTENG	57	1.491	2.613	4.160	476	148	32	22	43	74	127	85	53	5.222
18	SULUT	47	1.212	2.126	3.385	388	120	27	18	35	61	104	69	44	4.252
19	SULTENG	331	9.342	16.366	26.039	2.984	928	200	133	266	465	796	531	332	32.673
20	SULTRA	127	3.499	6.132	9.758	1.118	348	75	51	100	174	298	199	125	12.245
21	SULSEL	2.922	82.807	138.694	224.423	31.836	9.007	2.465	1.734	2.448	4.308	7.164	4.707	2.827	290.920
22	BALI	103	2.813	4.929	7.845	899	279	61	41	81	140	240	160	100	9.845
23	N.T.B	1.394	40.123	71.310	112.827	12.883	4.069	870	567	1.135	2.063	3.501	2.321	1.417	141.654
24	N.T.T	67	1.783	3.126	4.976	570	177	39	26	51	89	152	102	64	6.246
25	MALUKU	22	496	871	1.390	159	49	11	8	15	25	42	28	18	1.746
26	PAPUA	492	13.938	24.418	38.849	4.452	1.385	298	199	396	693	1.188	792	495	48.747
	JUMLAH	19.043	517.900	920.406	1.457.349	165.303	51.432	12.912	8.635	15.293	26.293	43.546	29.121	17.590	1.827.475

STRATEGI PERCEPATAN PENYERAPAN GABAH/BERAS TRIWULAN 1 – JANUARI S.D MARET 2019 (1)

STRATEGI PERCEPATAN PENGADAAN TW 1 2019

1. Integritas pelaksana di lapangan

- ✓ Menghindari *moral hazard* dan *need interest*

2. *Customer service*:

- ✓ Menjemput bola dengan mendatangi langsung petani
- ✓ Membuat jaringan dengan tim Sergap (pemetaan dan informasi lokasi panen dari pihak TNI/Distan)
- ✓ Hari Sabtu/Minggu dan libur nasional gudang tetap buka

3. Pembentukan Satker di masing-masing Divre/Subdivre

4. Penyiapan modal kerja pembelian lebih awal

- ✓ Meminta pihak bank tetap melayani di hari libur (Sabtu/Minggu ataupun libur nasional)

STRATEGI PERCEPATAN PENYERAPAN GABAH/BERAS TRIWULAN 1 – JANUARI S.D MARET 2019 (2)

STRATEGI PERCEPATAN PENGADAAN TW 1 2019

5. *Purchase Order (PO)* tidak dibatasi kuantumnya
6. Persyaratan sebagai pemasok lebih mudah
7. Optimalisasi kerjasama dengan pihak Petani/Poktan/Gapoktan yang diberi bantuan oleh Kementan/Distan (hasil produksinya di beli oleh BULOG)
8. Persiapan sarana pengolahan di masing-masing titik Divre/Subdivre
9. Kerjasama dg Poktan/Gapoktan dalam kegiatan On Farm

KESIAPAN PERUM BULOG



PENDANAAN

Anggaran untuk pembelian gabah/beras sudah tersedia dengan harga pembelian GKG Rp 5.115/kg & beras standar Inpres Rp 8.030/kg



SATKER ADA DN

Seluruh Divre telah diminta untuk membentuk Satker ADA DN di masing-masing wilayahnya sesuai kebutuhan Divre/Subdivre



GUDANG

1.507 unit gudang operasional, *space* masih memadai



UNIT PENGOLAHAN

66 unit pengolahan beras beroperasi di seluruh Indonesia



STRATEGI BULOG DALAM MENJAGA STABILISASI PANGAN DI TAHUN 2019

STRATEGI STABILISASI HULU DAN HILIR 2019



Mengoptimalkan penyerapan produksi Dalam Negeri untuk meredam kenaikan harga di sisi hulu sebagai fondasi pembentukan kestabilan harga di sisi hilir. Penyerapan produksi ini juga didukung oleh rencana peningkatan intensitas kerjasama dengan TNI dalam kegiatan Penyerapan Gabah



Mengoptimalkan pemerataan stok yang dimiliki BULOG untuk mengantisipasi kebutuhan kegiatan stabilisasi sehingga siap kapan saja dan dimana saja melakukan intervensi pasaran umum.



Melaksanakan KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga) dengan memperluas jaringan dan titik distribusi sampai dengan titik kantor kelurahan/desa, pemukiman padat penduduk, maupun warung/toko di tingkat desa.



Bekerjasama dengan berbagai instansi dan organisasi dalam penyediaan komoditas pangan pokok berkualitas dan murah bagi pegawai atau anggotanya (Polisi, TNI, Pemprov, Pemkab, dll).



Meningkatkan kegiatan komersial sebagai salah satu instrumen BULOG dalam memperbesar akses masyarakat terhadap pangan pokok yang berkualitas dan murah.



Mengoptimalkan pemetaan produksi dan preferensi konsumen untuk meningkatkan keakuratan pengadaan dan penyaluran/penjualan komoditas pangan pokok.

USULAN JANGKA PANJANG

- **Evaluasi tingkat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) secara berkala**
Evaluasi ini diperlukan untuk menjamin bahwa tingkat HPP selalu di atas harga pasaran sehingga mendukung usaha BULOG untuk menyerap gabah dan beras DN sehingga kesejahteraan petani lokal dapat turut terjaga.
- **Operasi Pasar permanen sepanjang tahun oleh BULOG**
Kebijakan ini dapat meningkatkan kebutuhan penyerapan gabah dan beras DN sehingga mendorong stabilisasi harga di tingkat hulu. Adapun stabilisasi di hulu juga akan mempengaruhi level harga di tingkat konsumen/eceran.
- **Sinergi antar kementerian/lembaga (K/L) dan BUMN/BUMD/BUMDES**
Perum BULOG bekerjasama dengan K/L dan BUMN/BUMD/BUMDES melalui program kemitraan on farm untuk jaminan pasokan dan program GEMPITA (Gerakan Mengonsumsi Produk KITA) agar karyawan/karyawati K/L (TNI, POLRI, ASN dll) dan BUMN/BUMD menggunakan produk Perum BULOG.
- **Pemberian tugas kepada BULOG sebagai pemasok tunggal BPNT**
Kebijakan ini mempermudah Pemerintah dalam melaksanakan kontrol dan koordinasi terhadap pelaksanaan pasokan komoditas pada program BPNT. Dengan diberikannya outlet-outlet penyaluran BPNT, akan mendorong adanya integrasi kebijakan di hulu dan hilir sesuai Kebijakan Inpres 5 tahun 2015 (penyerapan produksi petani dg outlet penyaluran masyarakat tertentu).

terima kasih